

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA APENG SEMBEKA KECAMATAN
SANGKUB KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**VIRLI C MAKASILI
FLORENCE D.J LENGKONG
BURHANUDDIN KIYAI**

cmakasili@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of regional expansion policies that have been carried out through several stages that are mature, planned and systematic greatly affect the quality of life of the community, both in the aspects of development, public services and in improving the welfare of the community in Apeng Sembeka Village, Sangkub District, Bolaang Mongondow Utara Regency. This study uses quantitative research methods that try to answer the magnitude of the effect of the variable implementation of regional expansion policies towards the variable improvement of public services.

Data collection is done through careful observation, questionnaires in a detailed context, in-depth interviews, and analysis results. The results of the simple linear regression analysis test showed the influence of the variable implementation of regional expansion policies on the improvement of public services had a positive and significant effect, and through correlation analysis showed that there was a relationship between the variable implementation of the regional expansion policies on increasing public services by 62.7% while the rest amounted to 37.4% is influenced by other factors.

Keywords : Policy Implementation, Area Expantion, Public Service

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonommi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai mandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nugroho (2003: 158) Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ini berarti untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dapat diterapkan pilihannya yakni langsung

mengimpelmentasikan dalam bentuk program-program atau pilihan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan pemerintah seduai dengan program, tujuan dan sasaran yang harus di capainya sehingga membutuhkan kemampuan dari pelaksana kebijakan atau aktor atau kelompok antar orang lain, kemampuan menyampaikan seluruh isi kebijakan secara cermat dan tepat, kemampuan membangun dan memelihara nilai-nilai dari tindakan yang ingin dilakukan para pelaku pelaksana kebijakan serta secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuannya, kemampuan menerapkan sistem operasional prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Kebijakan publik memeiliki jenis-jenis kebijakan publik yang memerlukan penjasla dengan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang langsung operasioanal terdiri dari

: Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, mmeudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemekaran wilayah hingga saat ini berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Subarsono (2005:88) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan langsung terhubung dengan kualitas pelayanan karena masing-masing variabel mempunyai keterkaitan yang sangat erat baik untuk kepentingan privat (pribadi), organisasi, maupun kepentingan Negara yang menentukan ke kalangan yang luas atau masyarakat umum. Desa Apeng Sembeka adalah merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Tujuan dimekarkannya Desa Apeng Sembeka ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan, dan juga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep tentang Impelementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah femomena yang sangat kompleks serta dipahami sebagai suatu proses, keluaran maupun sebagai hasilnya, seperti yang ditegaskan Winarto (2002:103) menyatakan bahwa impelementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan disisi lain juga merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sasaran-sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu pula. Untuk itulah diperlukan aspek teknik atau manajemen dalam organisasi yang merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan sesungguhnya sudah dipertimbangkan sejak kebijakan tersebut dalam perumusan dan proses penetapan oleh Soekarno.

Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Effendy (2008:01) mengatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik bisa diartikan sebagai sama dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat adalah usaha seseorang atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan (Toha, 1991; Sedarmyanti, 2013). Hayat (2017) memberikan penguatan tentang pengertian dari pelayanan publik. Menurutnya pelayanan publik adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan publik adalah mutlak harus di penuhi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Indikator kualitas pelayanan menurut pelanggan ada 5 (Lima) dimensi, (Irawan, 202; Muchsen 2007), yaitu : *Tangibels* (Bukti Fisik), *Reliability* (Kehandalan), *Responsivennes* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan) dan *Empathy* (Empati).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk berusaha menjawab besaran pengaruh variabel Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup kuisisioner dalam konteks yang mendetail serta wawancara yang mendalam juga melalui hasil analisis.

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 83 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisi Korelasi Product Moment.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian baik dari hasil wawancara, dan kuisisioner/angket,

maka peneliti menjelaskan tentang implikasi dan hasil-hasil penelitian, antara lain sebagai berikut :

Variabel Implementasi Kebijakan memiliki 6 (enam) dimensi yang dijadikan indikator untuk mengukur seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan, yaitu : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik antar Organisasi, Komunikasi antar Organisasi, Sikap para Pelaksana, dan Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik. Variabel Peningkatan Pelayanan Publik memiliki 5 (lima) yang dijadikan indikator untuk mengukur seberapa besar pengaruh Peningkatan Pelayanan Publik yaitu : Bukti Fisik (*Tangibels*), Kehandalan (*Reliability*), Respon/Ketanggapan (*Responsivines*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Empathy*).

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4 dan 5, dimana nilai r tabel dengan $N=83$ pada level signifikan 5% dan dapat dinilai r tabel sebesar 0,213. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dan berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 6, nilai cronbach alpha variabel X = 0,913 dan variabel Y = 0,906 dimana hasil tersebut lebih besar dari r_{tabel} sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y sudah memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau bersifat reliabel.

Berdasarkan tabel Correlations menggambarkan hubungan antara implementasi kebijakan pemekaran wilayah dan peningkatan pelayanan publik dimana besar korelasinya adalah 0,791 (korelasi positif) dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,00 dihitung melalui SPSS mempunyai hubungan sebesar 79,1%. Artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang cukup kuat dan signifikan dari angka sig (2-tailed) sebesar $0,00 < 0,005$.

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel implementasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Apeng

Sembeka. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil analisis regresi sederhana yaitu untuk menguji pol hubungan fungsional atau pengaruh dari variabel implementasi kebijakan pemekaran wilayah (X) terhadap peningkatan pelayanan publik (Y) diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 13,830 + 0,817X$. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien arah regresi bertanda positif. Selanjutnya harga konstanta (a) sebesar 13,830, bermakna apabila variabel independen implementasi kebijakan pemekaran wilayah berada pada posisi konstanta ($X = 0$), maka peningkatan pelayanan publik hanya dapat dicapai sebesar 13,83%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya R square (Koefisien determinasi) yang berfungsi mengetahui besarnya presentase variabel dependent yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel independent. R square 0,626 atau 62,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dependent bisa menjelaskan sebesar 62,6% terhadap variabel dependent dan sisanya sebesar 37,4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model persamaan regresi linier sederhana.

Melalui penelitian ini, maka dapat diketahui implementasi kebijakan pemekaran wilayah merupakan salah satu faktor penentu peningkatan pelayanan publik, khususnya masyarakat yang ada di Desa Apeng Sembeka. Hal ini dapat diindikasikan besaran kontribusi faktor implementasi kebijakan pemekaran wilayah, walaupun peningkatan pelayanan publik belum banyak dirasakan oleh semua masyarakat secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah dan masyarakat bisa saling membantu dan mengisi, dimana pemerintah harus aktif dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program kerja

dan masyarakat yang harus mendukung program pemerintah sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik, ketika kualitas sumber daya manusia meningkat maka wawasan, pikiran-pikiran yang aktif mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang yang jika dituangkan kedalam program kerja pemerintah desa maka pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat harus selalu aktif dimana pemerintah harus selalu siap siaga, dan harus meresponn dengan cepat setiap keluhan serta masalah yang di hadapi oleh masyarakat, karena pemerintah ada karena masyarakat, pemerintah harus selalu membantu dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat melalui proses pelayanan publik.

PENUTUP KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Melalui pengujian data, variabel Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah yang diukur melalui indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik antar Organisasi, Komunikasi antar Organisasi, Sikap para Pelaksana, Lingkungan Sosial dan Ekonomi Politik dan Variabel Peningkatan Pelayanan Publik diukur melalui indikator Bukti Fisik (*Tangibles*), Keandalan (*Reliability*) Respon/Ketanggapan (*Responsiveness*) Jaminan (*Assurance*), dan Empati (*Empathy*). Namun dari 6 dimensi variabel implementasi kebijakann pemekaran wilayah dapat penulis simpulkan bahwa ada 3 dimensi diantaranya sudah dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, diantaranya standar dan sasaran kebijakan dari pemekaran wilayah dalam artian standar dan sasaran kebijakan pemekaran wilayah di Desa Apeng Sembeka

adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan setelah adanya pemekaran wilayah masyarakat sudah bisa merasakan adanya peningkatan dalam hal pelayanan publik, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang semakin berkembang yang pada awalnya sebelum adanya pemekaran dimana dulunya Desa Apeng Sembeka merupakan salah satu dusun yang masih tergabung dengan Desa Induk yaitu Desa Sangtombolang, Desa Apeng Sembeka ini sendiri belum mampu untuk berkembang dan lingkungan sosial politik maupun ekonomi masih dibawah. Begitu pula ada 5 dimensi peningkatan pelayanan publik namun hanya 2 dimensi diantaranya yang dilakukan, diterapkan kepada masyarakat dimana fasilitas kantor yang sudah semakin banyak dan kehandalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran wilayah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat bahwa cukup besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Apeng Sembeka Kecamatan Sangkub. Pula ada faktor-faktor lain yang menjelaskan adanya pengaruh terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.

SARAN

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di Desa Apeng Sembeka Kecamatan Sangkub.
2. Tidak Diskriminasi terhadap masyarakat yang ada di Desa Apeng Sembeka.
3. Lebih Transparan terhadap setiap program-program pemerintahan
4. Harus mengutamakan atau mengedepankan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Apeng Sembeka itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta Timur : Intrans Publishing.
- Hayat, 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber Lain :**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang : *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : *Pelayanan Publik*.
- Nancy Melisa Onibala, Patar Ruimapea, Sonny Rompas. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)*. (Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. II. No 32. 2014).
- Wumu A. Harianto, Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo. 2015. *Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Tethadap Pelayanan Publik di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa*. (Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. IV. No 004, 2015).